

ANALISIS TEORI DAN KONSEP LITERASI KEWARGAAN PADA PENDIDIKAN ABAD KE-21

Wafiq Azizah*, Fitri Rahmadani, ST. Nurmala Binti Rusding, Nadya Unasyah Arifin, Muhammad Nawir

Program Studi Magister Pendidikan Dasar, Universitas Muhammadiyah Makassar

*Corresponding author email: wafiqzzh19@gmail.com

Article History

Received: 19 May 2026

Revised: 27 August 2026

Published: 31 August 2026

ABSTRACT

Civic literacy is a multidimensional competence that supports students in understanding public issues, participating in social life, reasoning critically, and acting responsibly as citizens. This study aims to (1) clarify the conceptual meaning and scope of civic literacy, (2) synthesize the main theoretical foundations underpinning its development, (3) identify its core dimensions and principles, and (4) formulate implications for civic literacy learning in elementary education. The study employed a structured library research approach. Literature was identified through Google Scholar and GARUDA using combinations of the keywords civic literacy, civic knowledge, civic skills, civic disposition, citizenship education, and elementary education. Ten core sources that met the relevance and publication-quality criteria were selected for synthesis. Data were analyzed through identification, classification, comparison, thematic synthesis, and interpretation. The synthesis shows that civic literacy is best understood as an integrated competence involving civic knowledge, civic skills, and civic disposition, with digital and participatory capacities becoming increasingly important in the contemporary context. The literature also indicates that contextual, participatory, critical, multicultural, inclusive, value-based, and experiential learning principles provide a stronger basis for developing civic literacy than knowledge transmission alone. The contribution of this review is a consolidated conceptual framework linking theoretical foundations, core dimensions, learning principles, and elementary-school implications of civic literacy.

Keywords: Civic Literacy, Citizenship Education, 21st-Century Education, Elementary Education.

Copyright © 2026, The Author(s).

How to cite: Azizah, W., Rahmadani, F., Arifin, N. U., Rusding, S. N. B., & Nawir, M. (2026). Analisis Teori dan Konsep Literasi Kewargaan Pada Pendidikan Abad Ke-21. *NUSRA : Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 7(3), 2183–2190. <https://doi.org/10.55681/nusra.v7i3.6438>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

LATAR BELAKANG

Pada era globalisasi dan digital saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek sosial, budaya, dan politik. Arus informasi yang begitu cepat dan tidak terbatas menuntut setiap individu memiliki kemampuan untuk memahami, menganalisis, serta menyikapi berbagai informasi secara bijak. Dalam konteks ini, literasi kewargaan (*civic literacy*) menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, khususnya peserta didik sejak usia sekolah dasar (Kurniyawan & Tanshzil, 2024).

Literasi kewargaan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga mencakup keterampilan berpikir kritis, kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta sikap yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan (Korompis, 2025). Hal ini literasi kewargaan merupakan kemampuan untuk memahami, menginternalisasi, dan mengimplementasikan nilai-nilai kewargaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, literasi kewargaan berperan penting dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan moral.

Dalam konteks pendidikan dasar, literasi kewargaan menjadi sangat penting karena pada tahap ini peserta didik berada pada fase perkembangan yang krusial dalam pembentukan karakter, sikap, dan identitas kewargaan. Peserta didik mulai mengenal aturan, memahami keberagaman, serta belajar berinteraksi dalam lingkungan sosial. Oleh karena itu, pendidikan literasi kewargaan tidak hanya berfungsi sebagai

transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan kebiasaan yang akan memengaruhi kehidupan mereka di masa depan.

Selain itu, literasi kewargaan juga memiliki relevansi yang kuat dengan penguatan Profil Pelajar Pancasila, khususnya dalam aspek bernalar kritis, berkebinekaan global, dan gotong royong (Indrayati & Desiga, 2025). Pendidikan kewargaan diharapkan mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki identitas nasional yang kuat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika global yang semakin kompleks. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peserta didik saat ini hidup di tengah masyarakat yang plural dan terhubung secara digital.

Namun, kajian tentang literasi kewargaan sering kali membahas definisi, dimensi, atau strategi pembelajaran secara terpisah. Sebagian penelitian menekankan civic knowledge dan hasil belajar, sebagian lain berfokus pada media digital, toleransi, atau partisipasi, sehingga hubungan antara landasan teori, dimensi civic literacy, dan prinsip pembelajarannya belum tersaji secara terpadu khusus untuk konteks pendidikan dasar. Kesenjangan tersebut menjadi dasar dilakukannya kajian kepustakaan ini.

Penelitian ini bertujuan menjawab empat fokus kajian: (1) apa makna dan ruang lingkup civic literacy dalam literatur pendidikan; (2) teori apa yang menjadi landasan pengembangannya; (3) dimensi dan prinsip apa yang secara konsisten muncul dalam literatur; dan (4) bagaimana temuan tersebut dapat diterjemahkan menjadi implikasi pembelajaran di sekolah dasar. Kontribusi kajian terletak pada penyusunan sintesis yang menghubungkan

konsep, teori, dimensi, prinsip, dan implikasi pedagogis dalam satu kerangka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, serta menganalisis secara mendalam mengenai teori dan konsep literasi kewargaan, termasuk dimensi dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman fenomena secara komprehensif melalui interpretasi terhadap berbagai sumber data yang relevan, sehingga mampu menghasilkan uraian yang sistematis dan mendalam terkait objek yang diteliti.

Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar dan GARUDA. Kata kunci yang digunakan secara kombinatorik meliputi “civic literacy”, “literasi kewargaan”, “civic knowledge”, “civic skills”, “civic disposition”, “citizenship education”, dan “elementary education”. Sumber dipertimbangkan apabila: (1) membahas konsep, teori, dimensi, atau pengembangan civic literacy/citizenship education; (2) relevan dengan konteks pendidikan dasar atau memberikan landasan teoretis yang dapat diterapkan pada pendidikan dasar; (3) berasal dari jurnal ilmiah, kerangka asesmen lembaga akademik, atau buku teori yang dapat diverifikasi; dan (4) memiliki identitas bibliografis yang jelas. Sumber yang tidak relevan dengan fokus kajian atau tidak memiliki informasi bibliografis yang memadai dikeluarkan.

Dari proses penelusuran dan verifikasi, dipilih 10 sumber inti untuk sintesis. Sumber tersebut mencakup karya

teoretis tentang pembelajaran sosial dan pendidikan demokrasi, kerangka internasional civic and citizenship education, serta penelitian empiris dan kajian pendidikan di Indonesia pada periode 2023–2026. Pemilihan 10 sumber ini dimaksudkan untuk menjaga fokus analisis; sumber pendukung digunakan hanya apabila diperlukan untuk memperjelas konsep.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menginterpretasikan isi literatur, membandingkan berbagai pendapat para ahli, serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai literasi kewargaan dalam konteks pendidikan dasar.

Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai sumber literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap referensi yang digunakan agar data yang diperoleh memiliki validitas dan kredibilitas yang baik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai pentingnya literasi kewargaan dalam membentuk peserta didik yang memiliki pengetahuan kewargaan, keterampilan sosial, kemampuan berpikir kritis, serta sikap demokratis dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Literasi kewargaan (*civic literacy*) merupakan salah satu kompetensi esensial dalam pendidikan dasar yang berfungsi menanamkan pemahaman, sikap, dan keterampilan kewargaan pada peserta didik (Mugara et al., 2025). Dalam konteks abad ke-21, literasi kewargaan tidak hanya mencakup kemampuan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga keterampilan berpartisipasi, berpikir kritis, berkomunikasi, bekerja sama, dan mengambil keputusan secara demokratis. Literasi kewargaan bertujuan membentuk peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab, beretika, toleran, serta mampu berkontribusi dalam kehidupan sosial sejak usia dini.

Pendidikan dasar merupakan tahap fundamental dalam pembentukan karakter dan identitas kewargaan. Pada usia sekolah dasar, peserta didik berada dalam fase perkembangan moral, sosial, dan kognitif yang sangat pesat. Mereka mulai mengenal aturan, memahami keberagaman, belajar mengontrol perilaku, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial sederhana seperti musyawarah kelas atau kerja kelompok. Oleh karena itu, pendidikan literasi kewargaan pada usia ini bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi pembentukan pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku yang akan menjadi dasar kewargaan mereka di masa depan.

Selain itu, literasi kewargaan sangat relevan dengan profil Pelajar Pancasila, terutama dimensi "Bernalar Kritis," "Berkebinekaan Global," dan "Gotong Royong." Pendidikan kewargaan bukan hanya memperkuat identitas nasional, tetapi juga menyiapkan peserta didik menjadi warga dunia yang menghargai perbedaan, memahami hak asasi manusia, dan memiliki

kecakapan sosial di tengah masyarakat global. Hal ini semakin penting mengingat anak-anak kini menghadapi interaksi lintas budaya, arus informasi digital, serta berbagai isu sosial yang kompleks.

Pendidikan literasi kewargaan di sekolah dasar juga berperan sebagai benteng dari berbagai tantangan sosial, seperti intoleransi, perundungan, individualisme, budaya konsumtif, dan paparan informasi palsu (*misinformation*). Literasi kewargaan memberikan landasan berpikir kritis bagi peserta didik untuk memilah informasi, memahami etika berkomunikasi, serta membentuk sikap tanggung jawab sosial yang tinggi. Dengan demikian, pendidikan kewargaan tidak hanya mengajarkan konsep-konsep formal tentang negara, hukum, dan demokrasi, tetapi juga membentuk karakter melalui pembiasaan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari.

Teori – Teori Literasi Kewargaan

Literasi kewargaan (*civic literacy*) tidak berdiri sendiri, melainkan didasarkan pada berbagai teori pendidikan dan sosial yang menjelaskan bagaimana individu memahami, mengembangkan, dan mempraktikkan perannya sebagai warga negara.

Berikut beberapa teori utama yang menjadi landasan literasi kewargaan:

1. Teori Konstruktivisme

Pengetahuan kewargaan merupakan dimensi yang berkaitan dengan pemahaman individu terhadap konsep, nilai, dan sistem dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengetahuan ini meliputi:

- a. Sistem pemerintahan dan demokrasi
- b. Hak dan kewajiban warga negara
- c. Konstitusi dan hukum
- d. Nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan

Dimensi ini penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam kehidupan sosial dan politik. Tanpa pengetahuan yang memadai, individu akan kesulitan memahami perannya sebagai warga negara (Kurniawan et al., 2025).

2. Pengetahuan Kewargaan (Civic Knowledge)

Pengetahuan kewargaan merupakan dimensi yang berkaitan dengan pemahaman individu terhadap konsep, nilai, dan sistem dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengetahuan ini meliputi:

- a. Keterampilan berpikir kritis dalam menganalisis isu-isu sosial dan politik
- b. Keterampilan berkomunikasi dan menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggung jawab
- c. Keterampilan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kehidupan demokrasi
- d. Keterampilan memecahkan masalah serta mengambil keputusan secara bijaksana

Dimensi ini penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam kehidupan sosial dan politik. Tanpa pengetahuan yang memadai, individu akan kesulitan memahami perannya sebagai warga negara (Supriatna & Atikah, 2024).

3. Sikap Kewargaan (Civic Disposition)

Sikap kewargaan merupakan dimensi yang berkaitan dengan nilai, karakter, dan kecenderungan perilaku individu sebagai warga negara. Sikap ini meliputi:

- a. Tanggung jawab
- b. Toleransi terhadap perbedaan
- c. Nasionalisme
- d. Kepedulian sosial
- e. Komitmen terhadap nilai demokrasi

Dimensi ini sangat penting karena menentukan bagaimana individu bertindak

dalam kehidupan sosial. Pengetahuan dan keterampilan tanpa sikap yang baik tidak akan menghasilkan perilaku kewargaan yang positif.

Prinsip-Prinsip Literasi Kewargaan

Literasi kewargaan (*civic literacy*) dikembangkan berdasarkan sejumlah prinsip dasar yang menjadi landasan dalam membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab (Syam et al., 2025). Prinsip-prinsip ini penting agar pengembangan literasi kewargaan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan nyata.

1. Prinsip Kontekstual

Prinsip kontekstual menekankan bahwa literasi kewargaan harus dikaitkan dengan kehidupan nyata yang dialami oleh individu. Pembelajaran kewargaan tidak hanya berisi teori, tetapi harus relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat (Lestari et al., 2025). Dengan pendekatan ini, individu dapat memahami isu-isu aktual seperti demokrasi, keberagaman, dan masalah sosial secara lebih nyata. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam kehidupan sosial (Judijanto et al., 2025).

2. Prinsip Partisipatif

Prinsip partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan aktif individu dalam kehidupan masyarakat (Sujarwadi et al., 2024). Literasi kewargaan tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata. Partisipasi dapat dilakukan melalui kegiatan sosial, diskusi publik, organisasi, maupun keterlibatan dalam proses demokrasi. Penelitian

menunjukkan bahwa literasi kewargaan yang baik dapat meningkatkan partisipasi sosial dan politik masyarakat.

3. Prinsip Kritis (*Critical Thinking*)

Prinsip ini menekankan kemampuan individu untuk berpikir kritis dalam menyikapi berbagai informasi dan isu publik. Individu diharapkan mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mengambil keputusan secara rasional. Di era digital, prinsip ini menjadi sangat penting untuk menghadapi hoaks, disinformasi, dan propaganda. Literasi kritis membantu individu dalam memahami informasi secara objektif.

4. Prinsip Multikultural

Prinsip multikultural menekankan penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, suku, dan latar belakang sosial. Literasi kewargaan harus mampu menumbuhkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan (Afriliani et al., 2024). Hal ini penting dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, agar tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Penelitian menunjukkan bahwa literasi kewargaan berperan dalam meningkatkan sikap toleransi dan menghargai keberagaman.

5. Prinsip Inklusif

Prinsip inklusif berarti bahwa literasi kewargaan harus dapat diakses oleh semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gender, atau kemampuan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan kewargaan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Pendekatan inklusif ini penting untuk menciptakan keadilan sosial dan kesetaraan dalam masyarakat.

6. Prinsip Berbasis Nilai (*Value-Based*)

Literasi kewargaan harus berlandaskan pada nilai-nilai dasar

seperti Pancasila, demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia (Azizah, 2021). Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam berpikir dan bertindak sebagai warga negara. Penguatan nilai-nilai ini penting untuk membentuk karakter bangsa dan menjaga identitas nasional.

7. Prinsip Berbasis Pengalaman (*Experiential Learning*)

Prinsip ini menekankan bahwa literasi kewargaan diperoleh melalui pengalaman langsung, bukan hanya melalui teori. Kegiatan seperti simulasi, diskusi, proyek sosial, dan praktik lapangan dapat membantu individu memahami konsep kewargaan secara lebih mendalam. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan kewargaan siswa.

8. Prinsip Literasi Digital Kewargaan

Di era modern, literasi kewargaan juga harus mencakup kemampuan digital. Prinsip ini menekankan pentingnya penggunaan teknologi secara bijak dalam kehidupan kewargaan (Rahmawati et al., 2022).

Individu harus mampu:

- a. Menyaring informasi
- b. Menghindari hoaks
- c. Berpartisipasi secara etis di media sosial

KESIMPULAN

Literasi kewargaan (*civic literacy*) merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Literasi ini tidak hanya mencakup pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga meliputi keterampilan berpikir kritis serta sikap yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, tanggung jawab, dan toleransi.

Berdasarkan pembahasan, literasi kewargaan memiliki landasan teoritis yang kuat, seperti teori konstruktivisme, pendidikan kewarganegaraan, literasi kritis, partisipasi sosial, dan pembelajaran sosial. Teori-teori tersebut menegaskan bahwa literasi kewargaan terbentuk melalui proses pendidikan, pengalaman, serta interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, literasi kewargaan terdiri dari beberapa dimensi utama, yaitu pengetahuan kewargaan (civic knowledge), keterampilan kewargaan (civic skills), dan sikap kewargaan (civic disposition), yang saling berkaitan dalam membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Dalam perkembangannya, literasi kewargaan juga mencakup aspek digital sebagai respons terhadap tantangan era informasi.

Prinsip-prinsip literasi kewargaan seperti kontekstual, partisipatif, kritis, multikultural, inklusif, berbasis nilai, dan berbasis pengalaman menjadi dasar dalam mengembangkan pembelajaran yang efektif dan relevan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter peserta didik sejak dini.

Dengan demikian, literasi kewargaan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriliani, M., Dewi, D. A., & Hayat, R. S. (2024). Implementasi Kesenian Sintren Melalui Literasi Budaya Dan Kewarganegaraan Pada Siswa Sekolah Dasar. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 2(1), 94–102.
- Azizah, N. R. (2021). Implementasi Literasi Budaya Dan Kewargaan Untuk Mengembangkan Keterampilan Sosial Siswa Madrasah Ibtidaiyah Di Tengah Pandemi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(01), 7–16.
- Indrayati, T., & Desiga, H. I. (2025). Penguatan Profil Pelajar Pancasila Sebagai Strategi Membangun Karakter Warga Negara Muda. *Jurnal Ilmiah Mitra Swara Ganesha: Penelitian Pendidikan Dan Pengajaran*, 12(2), 1–8.
- Korompis, M. E. V. (2025). Pengembangan Karakter Kewarganegaraan Di Lingkungan Pendidikan. *Collaborative: Journal Of Community Service*, 1(2), 77–89.
- Kurniawan, M. W., Darmawan, C., Sapriya, S., & Syaifullah, S. (2025). Analisis Model Literasi Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Kebangsaan Peserta Didik. *Jurnal Civic Hukum*, 10(1).
- Kurniawan, H., & Tanszil, S. W. (2024). Peran Dan Strategi Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Membangun Kemampuan Literasi Warga Negara. *Integralistik*, 35(1).
- Mugara, R., Yuliana, I., Pratiwi, L., Rusman, S. O., Zulaikhah, S., Irwan, A., & Sunardi, F. X. (2025). *Kajian Literasi Budaya Dan Kewargaan Perspektif Pendidikan Dasar Abad 21*.
- Putra, W. S., & Wanda, K. (2025). Fenomena Rendahnya Nalar Digital Masyarakat Indonesia: Analisis Perilaku Netizen Dan Solusi Pendidikan. *Indonesian Journal Of Islamic And Social Science*, 3(2), 146–167.
- Rahmawati, N., Prasetyo, W. H., Wicaksono, R. B., Muthali'in, A., & Huda, M. (2022). Pemanfaatan Sudut Baca Dalam Meningkatkan Literasi Kewarganegaraan Siswa Di Era Digital. *Buletin Kkn Pendidikan*, 99–107.

- Sari, R. K. (2021). Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia. *Jurnal Borneo Humaniora*, 4(2), 60–69.
- Sujarwadi, A., Dewi, D. A., & Hayat, R. S. (2024). Pentingnya Literasi Budaya Dan Kewarganegaraan Pada Siswa Sekolah Dasar Di Era Globalisasi. *Sintaksis: Publikasi Para Ahli Bahasa Dan Sastra Inggris*, 2(1), 127–135.
- Supriatna, M. N., & Atikah, C. (2024). Penguatan Kewargaan Melalui Literasi Budaya: Menjalin Harmoni Sosial Di Era Digital. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(4), 854–872.
- Syam, A. K., Nawir, M., Faisal, S. F. R., & Syukur, S. A. (2025). Integrasi Literasi Budaya Dan Kewargaan. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 256–270.